

**INDIKATOR MAKRO
EKONOMI DAN SOSIAL
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012**

<http://papuabarot.bps.go.id>



INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012

ISSN : 2252-3251
Katalog BPS : 3102005.91
No. Publikasi : 91300.13.16
Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : vi + 50 Halaman

Naskah:

Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Kata Pengantar

Publikasi “Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2012” merupakan sajian informasi yang dipersiapkan secara khusus bagi para pimpinan. Penyajian dalam publikasi ini dirancang secara ringkas dan padat, dilatarbelakangi oleh keterbatasan waktu yang tersedia bagi para pimpinan untuk menyarikan suatu informasi dari suatu sajian yang rinci.


Informasi yang disajikan terdiri atas inflasi yang memberikan gambaran tentang perkembangan daya beli masyarakat daerah perkotaan maupun di pedesaan. Nilai tukar petani akan memberikan informasi tentang kesejahteraan petani. Statistik pertanian menyajikan informasi tentang produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar.

Bagian lain publikasi ini juga menyajikan informasi tentang angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Sajian ketenagakerjaan ini dilengkapi pula dengan gambaran kinerja perekonomian melalui data pertumbuhan dan struktur ekonomi.

Untuk memberikan gambaran pendukung perkembangan pembangunan ekonomi, disajikan pula informasi tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan, baik berupa absolut dan persentase penduduk miskin; kedalaman dan keparahan kemiskinan; serta distribusi pendapatan.

Informasi yang tersaji dalam publikasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyajian pada masa mendatang.

Manokwari, Februari 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat,



Drs. Simon Sapary, M.Sc
NIP. 19660607 199302 1 001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
<hr/>	
INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL	1
A. KETENAGAKERJAAN	2
1. Angkatan Kerja	2
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3
3. Penduduk yang Bekerja	5
<hr/>	
B. KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	8
1. Perkembangan Penduduk Miskin	8
2. Perkembangan Garis Kemiskinan	10
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	12
4. Indeks Pembangunan Manusia	14
<hr/>	
C. PERTANIAN	16
1. Produksi Padi	16
2. Produksi Jagung	17
3. Produksi Kedelai	19
4. Produksi Ubi Kayu	20
5. Produksi Ubi Jalar	21
<hr/>	
D. NILAI TUKAR PETANI (NTP)	22
1. Perkembangan Nilai Tukar Petani	22
2. Perkembangan Nilai Tukar Petani menurut Subsektor	24
<hr/>	
E. INFLASI PEDESAAN	25



Daftar Isi

F. INFLASI	29
G. Kinerja Perekonomian 2011	34
1. Struktur Ekonomi	34
2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha	37
3. Pertumbuhan Ekonomi menurut Penggunaan	40
4. PDRB Per Kapita	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44



Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Agustus 2010-Agustus 2012	3
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2010-Agustus 2012	5
3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2010-Agustus 2012	7
4	Garis Kemiskinan dan Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2010-September 2012	18
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Papua Barat, Maret 2010-September 2012	13
6	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012	17
7	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012	18
8	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012	19
9	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012	20
10	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012	22
11	Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2012 (2007=100)	26
12	Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2012 (2007=100)	28
13	Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2012 (2007=100)	30



Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
13	Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2012 (2007=100)	30
14	Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Papua Barat Tahun 2012 (2007=100)	32
15	Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2012 (2007=100)	33
16	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012	35
17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012	36
18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012	39
19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012	41



Daftar Gambar

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Perkembangan Kemiskinan (Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan) Papua Barat Tahun 2010-2012	8
2	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011	15
3	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari-Desember 2012 Provinsi Papua Barat (2007=100)	23
4	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat 2009-2012 (2007=100)	23
5	Perkembangan Nilai tukar Petani Menurut Subsektor Papua Barat Tahun 2010-2012	24
6	Perkembangan Laju Inflasi Pedesaan Januari 2009-Desember 2012 Provinsi Papua Barat (2007=100)	27
7	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Papua Barat Januari 2009-Desember 2012	31
8	PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012	41





Di era globalisasi seperti sekarang ini data dan informasi menjadi kebutuhan yang sangat esensial dalam berbagai aspek kehidupan. Data dan informasi yang *up to date*, akurat, dan akuntabel memiliki banyak keuntungan. Pihak-pihak yang mampu memanfaatkan data dan informasi dengan cepat dan akurat akan menjadi ‘pemenang’ dalam seleksi alam era globalisasi. Dengan pemanfaatan informasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan berjalan dengan efektif dan efisien terutama dalam kegiatan pembangunan daerah.

Slogan ‘membangun memang mahal, tetapi membangun tanpa data akan jauh lebih mahal’ adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa data dan informasi itu menjadi hal yang esensial dalam proses pembangunan. Data dapat dihasilkan dari sebuah survei ataupun sensus dari banyak produsen data, misalnya BPS, SKPD, lembaga survei independen, akademisi, NGO, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak data tersebut hanya data yang bersifat akurat, relevan, *up to date*, akuntabel, independen, serta dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah memiliki nilai lebih dan layak untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu produsen data nasional memiliki karakteristik tersebut. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS merupakan lembaga pengumpul data statistik dasar. Disamping itu, BPS juga mengumpulkan data yang berasal dari kegiatan survei dengan dimensi yang sangat luas, hal ini tercermin dari ragam data yang dihasilkan bagi para konsumen data. Mulai dari data inflasi, NTP, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, produksi pertanian, pariwisata dan lain-lain.

“Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2012” adalah sebuah tulisan yang dirancang khusus untuk level pimpinan dengan maksud bisa menjadi sumber informasi untuk memahami pencapaian kinerja yang dapat dievaluasi secara terukur. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah sejumlah indikator penting seperti ketenagakerjaan, kemiskinan dan pembangunan manusia, angka ramalan pertanian, nilai tukar petani, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi.





A. KETENAGAKERJAAN

1. Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan rasio jumlah penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, dan menjadi indikator besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) untuk sektor ekonomi yang memproduksi barang-barang dan jasa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di Papua Barat pada Agustus 2012 mencapai 361.597 orang, menurun dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 yang mencapai 369.619 orang. Namun pada periode sebelumnya mengalami peningkatan terhadap tahun 2010, dimana angkatan kerja pada saat itu mencapai 342.888 orang. Pengaruh struktur penduduk usia muda di Papua Barat ditandai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15 tahun keatas), namun peningkatan tersebut ternyata tidak meningkatkan jumlah angkatan kerja tetapi jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya) tetap meningkat. Peningkatan tajam jumlah bukan angkatan kerja ini sebagian merupakan sumbangan dari penurunan jumlah angkatan kerja.

Dalam *The Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang diterbitkan oleh ILO disebutkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labour Force Participation Rate*) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting. Berdasarkan tingkat partisipasinya terhadap penduduk usia kerja, TPAK Papua Barat pada periode Agustus terus meningkat. Di tahun 2010 dan 2011 TPAK Papua Barat sebesar 69,29 persen dan 70,78 persen. Namun di periode Agustus 2012 TPAK Papua Barat mengalami penurunan menjadi 67,12 persen. Penurunan TPAK tahun 2012 terhadap tahun 2011 ini dipengaruhi oleh



Tabel 1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Agustus 2010-Agustus 2012			
	Uraian	Agustus		
		2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(4)	
Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	494.862	522.211	538.709	
Angkatan Kerja	342.888	369.619	361.597	
• Bekerja	316.547	336.588	341.741	
• Pengangguran	26.341	33.031	19.856	
Bukan Angkatan Kerja	151.974	152.592	177.122	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,29	70,78	67,12	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,68	8,94	5,49	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010-2012

penurunan angkatan kerja, diduga sebagian penduduknya yang termasuk angkatan kerja tersebut (bekerja dan pengangguran) beralih statusnya menjadi bukan angkatan kerja.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ketenagakerjaan yang sering dijadikan sebagai parameter keberhasilan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Semakin rendah angka TPT di suatu daerah dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja telah berjalan dengan baik karena permintaan akan lapangan pekerjaan (*supply*) sebagian besar dapat dipenuhi oleh pasar tenaga kerja (*demand*).

TPT merupakan rasio antara jumlah penduduk yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan (pengangguran) dengan jumlah penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain, TPT menggambarkan berapa jumlah pengangguran diantara 100 orang angkatan kerja. Perkembangan indikator ketenagakerjaan tersebut disajikan pada Tabel 1.





Struktur penduduk muda yang terjadi di Papua Barat berimplikasi pada besarnya kontribusi jumlah angkatan kerja dan berpeluang untuk terus meningkatkan *supply* tenaga kerja. Keseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja inilah yang perlu diperhatikan. Kecepatan pertumbuhan *supply* tenaga kerja harus mampu diimbangi oleh kecepatan *demand*-nya. Bila kecepatan *supply* lebih besar dari kecepatan *demand* tenaga kerja maka yang akan terjadi adalah terciptanya pengangguran. Selain itu juga harus diperhitungkan jumlah pengangguran di periode sebelumnya yang belum juga mendapatkan pekerjaan. Sehingga penciptaan lapangan kerja harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja baru yang terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah pengangguran di Papua Barat mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Di tahun 2010 jumlah pengangguran sebanyak 26.341 orang. Selanjutnya di tahun 2011 jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 6.690 orang menjadi 33.031 orang. Namun kemudian di tahun 2012 jumlah pengangguran menurun drastis menjadi 19.856 orang.

Setelah mengalami tren yang menurun di tahun 2007-2009, TPT Papua Barat kembali mengalami tren meningkat pada periode 2009-2011. Angka TPT Papua Barat menurun dari 9,46 persen di tahun 2007 menjadi 7,56 persen di tahun 2009. Namun setelah itu, angka TPT Papua Barat meningkat di tahun 2010 menjadi 7,68 persen. Di tahun 2011 angka TPT Papua Barat kembali meningkat cukup berarti menjadi 8,94 persen. Angka TPT Papua Barat di tahun 2012 mengalami perbaikan setelah mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 5,49 persen. Nilai TPT 5,49 persen mengandung makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 5-6 orang diantaranya adalah pengangguran.

Menurut catatan, nilai TPT ini adalah yang terendah sejak Papua Barat berdiri dan angka pengangguran Papua Barat mulai dihitung. Meskipun demikian, TPT Papua Barat pada tahun 2012 ini masih menempati peringkat ke 21 dari 33 provinsi di Indonesia, dimana TPT tertinggi ada di Provinsi Banten (10,13 persen) dan TPT terendah berada di Provinsi Bali (2,04 persen).





3. Penduduk Bekerja

Angkatan kerja terdiri dari dua komponen, yaitu pengangguran dan penduduk yang bekerja. Sedangkan konsep bekerja yang diadopsi dari *International Labour Organization* (ILO) menggunakan pendekatan kriteria satu jam bekerja (*the one-hour criterion*), yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Konsep ini telah dipakai secara internasional sehingga dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Situasi ketenagakerjaan pada Agustus 2012 dibandingkan Agustus 2011 ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Penduduk yang bekerja kondisi Agustus 2012 meningkat menjadi 341.741 orang dari 336.588 orang pada Agustus 2011. Sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja Agustus 2011 juga mengalami peningkatan dibandingkan saat kondisi Agustus 2010 yang mencapai 316.547 orang.

Tabel 2.		Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2010-Agustus 2012					
Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2010		Agustus 2011		Agustus 2012		
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Pertanian	171.060	54,04	163.164	48,48	158.974	46,52	
Industri	12.300	3,89	11.580	3,44	17.652	5,17	
Perdagangan	37.852	11,96	56.325	16,73	51.869	15,18	
Jasa-jasa	54.070	17,08	58.731	17,45	60.633	17,74	
Lainnya	41.265	13,04	46.788	13,90	52.613	15,40	
TOTAL	316.547	100,00	336.588	100,00	341.741	100,00	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010-2012

*) Lainnya : Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; Konstruksi; Transportasi; serta Keuangan dan Jasa Perusahaan



Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja Agustus 2012 bertambah sebanyak 5.153 orang terhadap Agustus 2011. Diantara penambahan jumlah tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada lapangan pekerjaan industri, yakni bertambah sebanyak 6.072 orang selama setahun. Namun justru sebaliknya terjadi pada sektor pertanian, sektor ini mengalami penurunan pekerja mencapai 4.190 orang. Penurunan di sektor pertanian memang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Penduduk usia kerja telah mulai meninggalkan sektor ini dan beralih ke sektor lainnya yang dinilai lebih menjanjikan. Meskipun demikian, setidaknya sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Papua Barat.

Sektor pertanian selalu menjadi kontributor utama tenaga kerja di Papua Barat selama ini. Namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2010, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 54,04 persen dari total pekerja di Papua Barat. Kemudian kontribusinya mengalami penurunan menjadi 48,48 persen di tahun 2011 dan kembali menurun menjadi 46,52 persen di tahun 2012. Sektor jasa-jasa menjadi sektor yang terus konsisten menunjukkan peningkatan kontribusi pekerja dan memberikan kontribusi yang signifikan di Papua Barat setelah sektor pertanian. Sektor jasa-jasa kontribusinya meningkat dari 17,08 persen di tahun 2010 menjadi 17,45 persen di tahun 2011. Di tahun 2012 tren positif tersebut terus berlanjut ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor ini menjadi 17,74 persen atau tenaga kerjanya bertambah sebanyak 1.902 orang.

Status pekerjaan utama digunakan untuk mengelompokkan kegiatan pekerja. Pekerja formal adalah pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan, selain dalam kategori tersebut termasuk sebagai pekerja informal. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, terjadi tren peningkatan pekerja formal dalam tiga tahun terakhir. Pekerja sektor formal meningkat dari 32,61 persen pada Agustus 2010 menjadi 38,21 persen pada Agustus 2011 dan kembali meningkat menjadi 38,77 persen pada Agustus 2012. Sebaliknya pekerja pada kegiatan



informal turun dari 67,39 persen pada Agustus 2010 menjadi 61,79 persen pada Agustus 2011. Pekerja di sektor informal kembali mengalami penurunan pada kondisi Agustus 2012 menjadi 61,23 persen. Tren positif peningkatan pekerja formal ini diduga akan membawa perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga karena umumnya pekerja di sektor formal memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik dari pekerja di sektor informal.

Dari 341.741 penduduk yang bekerja pada Agustus 2012, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 124.690 orang (36,49 persen), pekerja tak dibayar 71.879 (21,03 persen), berusaha sendiri 67.749 orang (19,82 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap 63.895 orang (18,70 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di pertanian sebanyak 5.725 orang (1,68 persen). Jika dilihat distribusinya dalam dua tahun terakhir, struktur pekerja menurut status pekerjaan relatif stabil, artinya komposisi proporsi pekerja relatif tidak berubah secara signifikan.

Tabel 3. Status Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2010-Agustus 2012		
	Agustus		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	48.917	65.828	67.749
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	81.975	61.194	63.895
Berusaha dibantu buruh tetap	5.166	6.612	7.803
Buruh/Karyawan/Pegawai	98.067	122.001	124.690
Pekerja Bebas	3.833	7.176	5.725
Pekerja Tidak Dibayar	78.589	73.777	71.879
TOTAL	316.547	336.588	341.741

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010-2012

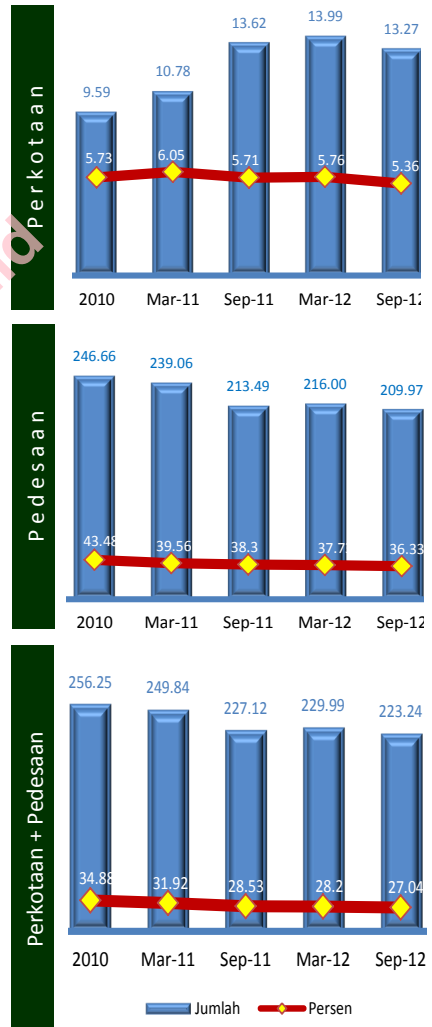


B. KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan *benchmark* garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan



Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan (Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan) Papua Barat Tahun 2010-2012





makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 Kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

Persentase penduduk miskin Papua Barat secara nasional pada kondisi September 2012 (27,04 persen) adalah yang tertinggi kedua setelah Provinsi Papua (30,66 persen). Kedua provinsi tersebut selama ini selalu menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar di Indonesia. Selama periode 2010–2012, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat menunjukkan tren menurun. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 256.250 jiwa (34,88 persen) pada tahun 2010 turun menjadi 223.240 jiwa (27,04 persen) pada kondisi September 2012. Jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir (periode 2010-2012) secara agregat turun sebesar 33.010 jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 7,84 persen.

Penurunan angka kemiskinan Provinsi Papua Barat selama Maret 2010–September 2012 sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2010 tercatat 246.660 jiwa (43,48 persen) turun menjadi 209.970 jiwa (36,33 persen) pada September 2012. Penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan Maret 2010-September 2012 sebesar 36.690 jiwa lebih tinggi daripada penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Provinsi Papua Barat. Sedangkan penurunan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 7.15 persen.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di perkotaan selama Maret 2010–September 2012 meningkat. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 9.590 jiwa pada Maret 2010 menjadi 13.270 jiwa pada kondisi September 2012. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat namun persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan, yaitu dari 5,73 persen pada Maret 2010 menjadi 5,36 persen pada kondisi September 2012.





2. Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat September 2012 sebesar 354.626 rupiah/kapita/bulan terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 282.516 rupiah/kapita/bulan dan garis kemiskinan non makanan sebesar 72.110 rupiah/kapita/bulan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan total (makanan dan non makanan) sebesar 79,67 persen.

Dibanding Maret 2012, garis kemiskinan Papua Barat September 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,34 persen. Kenaikan garis kemiskinan pada September 2012 di perkotaan (7,06 persen) lebih tinggi daripada kenaikan garis kemiskinan di pedesaan (5,98 persen). Sebagai pembandingan, inflasi perkotaan Maret-September 2012 (perbandingan IHK Maret 2011 dengan IHK September 2012) tercatat 5,13 persen, sementara kondisi perubahan harga Maret-September 2012 di pedesaan tercatat deflasi 3,70 persen. Perubahan garis kemiskinan perkotaan tersebut sejalan dengan inflasi yang tinggi di daerah perkotaan pada periode Maret-September yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan yang memiliki inflasi yang lebih rendah.

Secara umum, inflasi Papua Barat relatif tinggi pada periode Maret-September. Bahkan inflasi tahun kalender Papua Barat 2012 (baik perkotaan maupun pedesaan) meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2011. Inflasi tahun kalender 2012 sebesar 4,99 persen di daerah perkotaan dan 5,62 persen di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 (2,36 persen dan 0,50 persen). Meskipun demikian, secara umum jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan. Kondisi ini diduga salah satunya disebabkan oleh terjadi penurunan angka pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Seperti diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, tingkat pengangguran menurun 8,94 persen (2011) menjadi 5,49 persen (2012) dan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari 336.588 orang (2011) menjadi 341.741 orang di tahun 2012 yang berimplikasi pada perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga penduduk Papua Barat.



Uraian		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Perubahan (%)		
		Makanan	Non Makanan	Total	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Perkotaan							
Maret 2010	233.764	85.406	319.170	4,74	12,16	9,77	
Maret 2011	251.752	90.958	342.709	7,38	12,41	5,58	
September 2011	258.678	97.544	356.222	3,94	26,34	-5,62	
Maret 2012	255.001	94.677	349.678	-1,84	2,72	0,88	
September 2012	273.630	100.702	374.382	7,06	-5,15	-6,94	
Pedesaan							
Maret 2010	238.145	49.367	287.512	6,74	-0,66	-2,75	
Maret 2011	255.647	56.090	311.737	8,43	-3,08	-9,02	
September 2011	260.579	64.549	325.128	4,29	-10,70	-3,18	
Maret 2012	271.489	55.125	326.613	0,46	1,18	-1,49	
September 2012	286.304	59.853	346.157	5,98	-2,79	-3,71	
Perkotaan+Pedesaan							
Maret 2010	237.147	57.580	294.727	6,24	-0,23	-2,32	
Maret 2011	254.759	64.036	318.796	8,17	-2,5	-8,49	
September 2011	260.009	74.440	334.449	4,91	-9,09	-10,62	
Maret 2012	266.576	66.908	333.485	-0,29	1,26	-1,16	
September 2012	282.516	72.110	354.626	6,34	-2,93	-4,11	

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2012



3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selaras dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat selama periode Maret-September 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Papua Barat September 2012 menurun dibandingkan kondisi Maret 2012 dari 7,23 menjadi 5,71. Penurunan P_1 tidak hanya terjadi di daerah pedesaan saja (dari 9,78 menjadi 7,88), tetapi P_1 di daerah perkotaan juga mengalami penurunan (1,24 menjadi 0,65). Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan. Secara umum Indeks P_2 Papua Barat juga mengalami penurunan yaitu dari 2,65 pada kondisi Maret 2012 menjadi 1,71 untuk keadaan September 2012. Kondisi serupa juga terjadi bila dilihat dari sisi wilayah kota-desa. Indeks P_2 di pedesaan mengalami penurunan (dari 3,63 menjadi 2,37) demikian pula di daerah perkotaan nilai Indeks P_2 -nya pun menurun (dari 0,34 menjadi 0,15).

Penurunan kedua nilai indeks (Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan) keadaan September ini mengandung makna bahwa kondisi kemiskinan di Papua Barat menjadi semakin membaik. Artinya rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat dan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan untuk daerah pedesaan telah berhasil turun. Permasalahan utama kemiskinan berada pada daerah perkotaan. Indikator-indikator kemiskinan menunjukkan tren yang semakin meningkat, namun bukan berarti masalah kemiskinan di pedesaan telah terselesaikan. Program-program pemerintah yang pro penduduk miskin (*pro poor policy*) mutlak diperlukan mengingat posisi Papua Barat berada di urutan kedua provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli, serta mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar penduduk miskin, misalnya dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.



Tabel 5.		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Papua Barat, Maret 2010-September 2012		
Uraian	Daerah Tempat Tinggal			
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)				
Maret 2010	1,14	13,22	10,47	
Maret 2011	0,80	11,13	8,78	
September 2011	1,14	10,32	7,57	
Maret 2012	1,24	9,78	7,23	
September 2012	0,65	7,88	5,71	
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)				
Maret 2010	0,36	5,47	4,30	
Maret 2011	0,14	4,40	3,43	
September 2011	0,36	3,76	2,74	
Maret 2012	0,34	3,36	2,65	
September 2012	0,15	2,37	1,71	

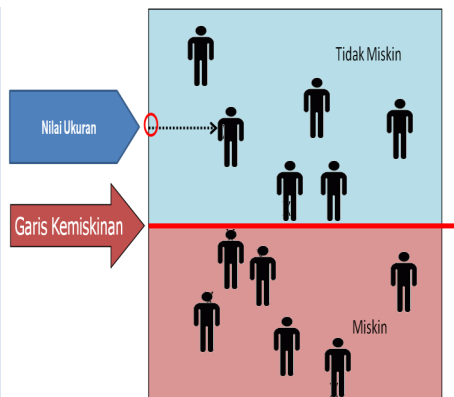
Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2012

Indeks Kedalaman Kemiskinan:

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan:

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.





4. Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sempitnya kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah merupakan akar permasalahan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk Papua Barat 2000-2010 tergolong tinggi yaitu mencapai 3,71 persen. Nilai pertumbuhan ini adalah yang tertinggi keempat di Indonesia setelah Provinsi Papua (5,39%); Provinsi Kepulauan Riau (4,95%); dan Provinsi Kalimantan Timur (3,81%). Sedangkan sempitnya kesempatan kerja direfleksikan dari tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka TPT Papua Barat sebesar 5,49 persen pada kondisi Agustus 2012. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, TPT Papua Barat hanya berada di peringkat ke-21 di Indonesia. Sedangkan angka kemiskinan Papua Barat beberapa tahun terakhir tetap terpatu berada di peringkat kedua terendah di Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM terdapat tiga komponen utama dalam mengukur pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup), dimensi pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta dimensi ekonomi digambarkan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM Papua Barat tahun 2011 mencapai 69,65 yang dibentuk oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 68,81 tahun (nilai indeks 73,02); Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 93,39 persen (nilai indeks 93,39) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,26 tahun (nilai indeks 55,10); serta *Purchasing Power Parity* sebesar 599.280 rupiah per kapita per bulan (nilai indeks 55,30). Khusus untuk indeks pendidikan, merupakan gabungan antara indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah dengan proporsi penimbang 2:1 (dua per tiga AMH dan sepertiga RLS). Dengan demikian, Nilai indeks pendidikan Papua Barat mencapai 80,63. Ketiga nilai indeks tersebutlah yang membentuk angka IPM Papua Barat.



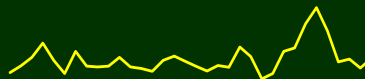


Berdasarkan kriteria pengelompokan IPM menurut UNDP, IPM Papua Barat termasuk kedalam kelompok menengah dengan interval 50,00-79,99. Sedangkan posisi IPM Papua Barat tahun 2011 diantara provinsi lainnya secara nasional berada pada peringkat ke-29 dari 33 provinsi. Peringkat Papua Barat berada diatas Provinsi Maluku Utara (69,47 rangking 30), Nusa Tenggara Timur (67,75 rangking 31), Nusa Tenggara Barat (66,23 rangking 32) dan Papua (65,36 rangking 33).

IPM tertinggi kabupaten/kota di Papua Barat berada di Kota Sorong dengan nilai IPM sebesar 77,72, sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 50,81. Peringkat IPM kabupaten/kota di Papua Barat diantara kabupaten/kota di seluruh Indonesia cukup mengkhawatirkan. Tujuh dari sebelas kabupaten/kota di Papua Barat memiliki peringkat diatas 400 dari sekitar 497 kabupaten/kota secara nasional. Kota Sorong yang merupakan peraih nilai IPM tertinggi di Papua Barat hanya berada di peringkat ke-31, sedangkan Kabupaten Tambrauw peraih nilai IPM terendah di Papua Barat berada di peringkat ke-485 di Indonesia (2010).



Peringkat Nasional IPM 2010 Kabupaten/Kota	
1.	Fakfak 230
2.	Kaimana 311
3.	Teluk Wondama 451
4.	Teluk Bintuni 439
5.	Manokwari 426
6.	Sorong Selatan 444
7.	Sorong 387
8.	Raja Ampat 463
9.	Tambrauw 485
10.	Maybrat 448
11.	Kota Sorong 31



C. PERTANIAN

1. Produksi Padi

Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2011 sebesar 29,30 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), terjadi penurunan sebanyak 4,95 ribu ton (14,45 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Penurunan produksi padi tahun 2011 disumbang oleh penurunan produksi padi sawah yang cukup besar yaitu sebanyak 7,31 ton (22,20 persen) meskipun produksi padi ladang mengalami sebesar 174,37 persen atau sebanyak 2,35 ribu ton. Peningkatan presentase produksi padi ladang yang tinggi tidak terlalu berpengaruh pada produksi padi secara total karena produksi padi sawah kuantitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Penurunan produksi padi disebabkan oleh adanya penurunan luas panen secara total. Luas panen padi sawah menurun 2.071 hektar (23,09 persen), sedangkan padi ladang justru meningkat 890 hektar (179,80 persen). Dari sisi produktivitas, padi sawah produktivitasnya meningkat 0,42 kwintal/hektar (1,14 persen) dan padi ladang produktivitasnya menurun 0,53 kwintal/hektar (1,94 persen). Meskipun demikian, produktivitas padi sawah dan ladang mengalami penurunan 0,82 kwintal/hektar (2,27 persen).

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi padi tahun 2012 diperkirakan sebesar 31,99 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), terjadi peningkatan sebanyak 2,69 ribu ton (9,17 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2011. Peningkatan produksi tahun 2012 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 3,95 kwintal/hektar atau 11,16 persen, sedangkan luas panennya diperkirakan akan turun sebesar 149 hektar (1,80 persen). Peningkatan produktivitas ini dikontribusi oleh peningkatan produktivitas padi sawah dan padi ladang, yaitu sebesar 4,16 kwintal/hektar (11,21 persen) untuk padi sawah dan 0,36 kwintal/hektar (1,35 persen) untuk padi ladang. Disisi lain, meskipun terjadi peningkatan luas panen pada padi sawah sebesar 122 hektar (1,77 persen), secara total luas panen menurun karena terjadi penurunan yang lebih besar pada padi ladang, yaitu sebesar 271 hektar (19,57 persen).





Tabel 6.

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012

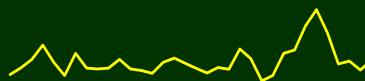
Uraian	2010	2011	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010-2011		Perkembangan 2011-Aram II 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PADI SAWAH							
Luas Panen (Ha)	8.969	6.898	7.070	-2.071	-23,09	122	1,77
Produktivitas (Kw/Ha)	36,69	37,11	41,27	0,42	1,14	4,16	11,21
Produksi (Ton)	32.905	25.600	28.971	-7.305	-22,20	3.371	13,17
PADI LADANG							
Luas Panen (Ha)	495	1.385	1.114	890	179,80	-271	-19,57
Produktivitas (Kw/Ha)	27,27	26,74	27,10	-0,53	-1,94	0,36	1,35
Produksi (Ton)	1.350	3.704	3.019	2.354	174,37	-685	-18,49
PADI (SAWAH + LADANG)							
Luas Panen (Ha)	9.464	8.283	8.134	-1.181	-12,48	-149	-1,80
Produktivitas (Kw/Ha)	36,20	35,38	39,33	-0,82	-2,27	3,95	11,16
Produksi (Ton)	34.255	29.304	31.990	-4.951	-14,45	2.686	9,17

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2010-2012

2. Produksi Jagung

Angka Tetap (ATAP) produksi jagung tahun 2011 sebesar 2,12 ribu ton Pipilan Kering atau meningkat sebesar 194 ton (10,05 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen yang cukup besar yaitu sekitar 116 hektar (9,98 persen), produktivitasnya pun meningkat sebesar 0,01 kuintal/hektar (0,06 persen) menjadi 16,63 kuintal/hektar.





Peningkatan produksi jagung tahun 2011 sebesar 194 ton tersebut terjadi akibat peningkatan yang tinggi di subround satu. Pada subround Januari-April mengalami peningkatan sebesar 295 ton (73,75 persen), subround Mei-Agustus turun sebesar 300 ton (60,36 persen), sedangkan subround September-Desember menurun sebesar 401 ton (38,78 persen) jadi subround Januari-Desember meningkat 194 ton (10,05 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama (*year on year*) tahun 2010 (lihat lampiran Tabel 8).

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi jagung tahun 2012 diperkirakan sebesar 2,17 ribu ton Pipilan Kering atau meningkat sebesar 49 ton (2,31 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2011. Peningkatan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan produktivitas sekitar 0,47 kwintal/hektar (2,83 persen), sedangkan luas panen diperkirakan akan menurun tipis sebesar 7 hektar (0,55 persen).

Peningkatan produksi jagung tahun 2012 sebesar 49 ton (2,31 persen) terjadi pada realisasi subround September-Desember sebesar 195 ton (30,81 persen), sedangkan dua subround lainnya mengalami penurunan produksi, yaitu subround Januari-April sebesar 118 ton (16,98 persen) dan subround Mei-Agustus akan mengalami penurunan 28 ton (3,51 persen) dibandingkan dengan subround yang sama pada tahun 2011 (*year on year*).

Uraian	2010	2011	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010-2011		Perkembangan 2011-Aram II 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JAGUNG							
Luas Panen (Ha)	1.162	1.278	1.271	116	9,98	-7	-0,55
Produktivitas (Kw/Ha)	16,62	16,63	17,10	0,01	0,06	0,47	2,83
Produksi (Ton)	1.931	2.125	2.174	194	10,05	49	2,31

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2010-2012



3. Produksi Kedelai

Angka Tetap (ATAP) produksi kedelai tahun 2011 sebesar 403 ton Biji Kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 198 ton (32,95 persen). Penurunan produksi kedelai tahun 2011 terjadi karena menurunnya luas panen seluas 196 hektar atau 34,33 persen, namun demikian produktivitas mengalami peningkatan tipis sebesar 0,21 kuintal/hektar (1,99 persen).

Penurunan produksi kedelai tahun 2011 sebesar 198 ton terjadi pada seluruh subround, yaitu Januari-April sebesar 151 ton (52,07 persen), Mei-Agustus sebesar 19 ton (14,18 persen), dan subround September-Desember sebesar 28 ton (15,82 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama (*year on year*) tahun 2010 (Lampiran Tabel 9).

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi kedelai tahun 2012 diperkirakan sebesar 957 ton Biji Kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2011, terjadi peningkatan sebesar 554 ton (137,47 persen). Peningkatan produksi kedelai tahun 2012 diperkirakan terjadi karena kembali meningkatnya luas panen seluas 500 hektar atau 133,33 persen, demikian pula dengan produktivitasnya diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,20 kuintal/hektar (1,86 %).

Tabel 8.		Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012					
Uraian	2010	2011	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010-2011		Perkembangan 2011-Aram II 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEDELAI							
Luas Panen (Ha)	571	375	875	-196	-34,33	500	133,33
Produktivitas (Kw/Ha)	10,53	10,74	10,94	0,21	1,99	0,20	1,86
Produksi (Ton)	601	403	957	-198	-32,95	554	137,47

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2010-2012



4. Produksi Ubi Kayu

Angka Tetap (ATAP) produksi ubi kayu tahun 2011 sebesar 20,44 ribu ton umbi basah, mengalami penurunan mencapai 18,61 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2010 atau sebesar 25,11 ribu ton. Penurunan produksi tahun 2011 diperkirakan terjadi karena adanya penurunan yang tajam luas panen yaitu mencapai 625 hektar atau 26,38 persen. sementara itu, peningkatan produktivitas Ubi kayu ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Produktivitas ubi kayu tahun 2011 meningkat 11,19 kuintal/hektar (10,56 persen).

Penurunan produksi ubi kayu tahun 2011 sebesar 4,67 ribu ton terjadi pada subround September-Desember, sedangkan pada subround lainnya justru mengalami peningkatan. Pada subround September-Desember produksi ubi kayu mengalami penurunan yang sangat dramatis, yaitu menurun hingga 12,69 ribu ton dengan persentase penurunan mencapai 71,00 persen. Sedangkan pada subround Januari-April dan Mei-Agustus produksinya mengalami peningkatan, yaitu masing-masing naik sebesar 4.341 ton (122,87 persen) dan 3.674 ton (99,03 persen) dibandingkan dengan produksi ubi kayu pada subround yang sama tahun 2010 (*year on year*).

Tabel 9.		Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012					
Uraian	2010	2011	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010-2011		Perkembangan 2011-Aram II 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UBI KAYU							
Luas Panen (Ha)	2.369	1.744	1.260	-625	-26,38	-484	-27,75
Produktivitas (Kw/Ha)	106,01	117,20	113,71	11,19	10,56	-3,49	-2,98
Produksi (Ton)	25.114	20.440	14.328	-4.674	-18,61	-6.112	-29,90

Keterangan: Kualitas produksi Ubi Kayu adalah umbi basah



Angka Ramalan II (ARAM II) produksi ubi kayu tahun 2012 diperkirakan sebesar 14,33 ribu ton umbi basah, mengalami penurunan sebesar 29,90 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2011 atau sebanyak 6,11 ribu ton. Penurunan produksi Ubi kayu tahun 2012 diperkirakan terjadi karena adanya penurunan luas panen maupun produktivitas. Penurunan luas panen sebesar 484 hektar (27,75 persen) yaitu dari 1.744 hektar (2011) menjadi 1.260 hektar (ARAM II 2012). Sedangkan penurunan produktivitas adalah sebesar 3,49 kuintal/hektar (3,95 persen), yaitu berasal dari penurunan 117,20 kuintal/hektar (2011) menjadi 113,71 kuintal/hektar (ARAM II 2012).

5. Produksi Ubi Jalar

Angka Tetap (ATAP) produksi ubi jalar tahun 2011 sebesar 10,41 ribu ton umbi basah atau turun sebesar 147 ton (1,39 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Penurunan produksi tersebut terjadi karena turunnya luas panen sekitar 21 hektar (2,02 persen), disisi lain, produktivitasnya meningkat sebesar 0,65 kuintal/hektar (0,64 persen).

Penurunan produksi ubi jalar tahun 2011 sebesar 147 ton terjadi pada subround ketiga, yaitu pada subround September-Desember terjadi penurunan produksi sebesar 2,96 ribu ton (52,03 persen), sedangkan subround lainnya mengalami peningkatan, yaitu subround Januari-April sebesar 1,38 ribu ton (59,42 persen) dan subround Mei-Agustus sebesar 1,43 ribu ton (56,28 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama 2010 (*year on year*).

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi ubi jalar tahun 2012 diperkirakan sebesar 10,81 ribu ton umbi basah atau meningkat sebesar 398 ton (3,82 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2011. Peningkatan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sekitar 27 hektar (2,65 persen), sedangkan produktivitasnya diperkirakan juga akan meningkat sebesar 1,17 kuintal/hektar (1,14 persen).



Tabel 10.		Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2010-2012					
Uraian	2010	2011	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010-2011		Perkembangan 2011-Aram II 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UBI JALAR							
Luas Panen (Ha)	1.039	1.018	1.045	-21	-2,02	27	2,65
Produktivitas (Kw/Ha)	101,61	102,26	103,43	0,65	0,64	1,17	1,14
Produksi (Ton)	10.557	10.410	10.808	-147	-1,39	398	3,82

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2010-2012

Keterangan: Kualitas produksi Ubi Kayu adalah umbi basah

D. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

1. Perkembangan Nilai Tukar Petani

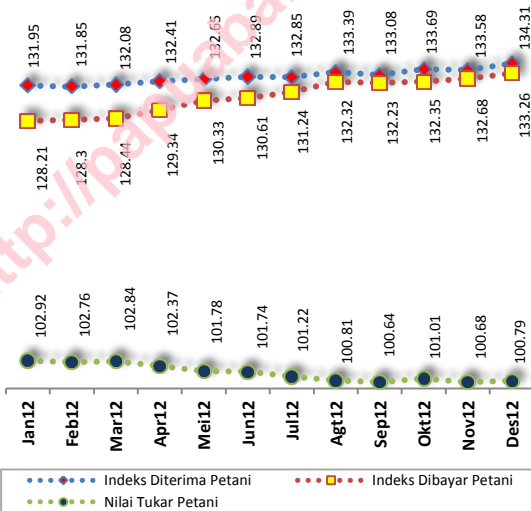
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima (I_t) petani terhadap indeks harga yang dibayar (I_b) petani (dalam persentase). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat/kemampuan daya beli petani di pedesaan, disamping itu juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Jika NTP lebih besar dari 100 berarti petani mempunyai surplus atas usaha taninya, sebaliknya bila di bawah 100, berarti petani tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangga dan mencukupi biaya-biaya usaha taninya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga pedesaan pada delapan kabupaten di Provinsi Papua Barat setiap bulan diperoleh informasi perkembangan NTP Papua Barat yang secara resmi dirilis kepada publik. Nilai NTP Papua Barat tahun 2012 sebesar 100,79, dengan indeks yang diterima petani sebesar 134,31 dan indeks yang dibayarkan petani sebesar 133,26. Nilai

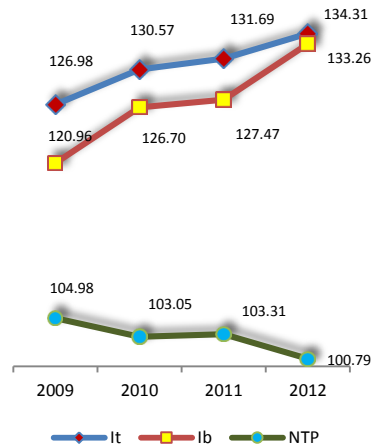


NTP 100,79 artinya petani mengalami surplus usaha sebesar 0,79 persen terhadap tahun dasar (2007=100).

Sepanjang lima tahun terakhir nilai NTP Papua Barat selalu surplus tetapi terus mengalami penurunan, meskipun ditahun 2011 nilai NTP sedikit meningkat dibandingkan tahun 2010. Di tahun 2009 nilai NTP Papua Barat mencapai 104,98, kemudian nilai NTP mengalami sedikit menurun di tahun 2010 menjadi 103,05. Di tahun 2011 nilai NTP sempat mengalami peningkatan tipis menjadi 103,31 dan akhirnya di tahun 2012 nilai NTP kembali menurun menjadi 100,79 menuju posisi *break event point* atau nilai impas antara indeks yang dibayar dan diterima (nilai indeks = 100). Penurunan nilai NTP umumnya disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian menurun dan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami peningkatan.

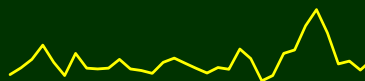


Gambar 3. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari-Desember 2012 Provinsi Papua Barat (2007=100)



Gambar 4. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat 2009-2012 (2007=100)





2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

NTP Papua Barat berdasarkan subsektor menunjukkan bahwa seluruh subsektor mengalami surplus usaha kecuali pada subsektor tanaman pangan. Subsektor dengan nilai NTP tertinggi tahun 2012 berada pada subsektor perkebunan rakyat (NTPR). Subsektor ini memiliki NTP sebesar 116,92 dengan indeks yang dibayarkan petani sebesar 131,01 dan indeks yang diterima petani sebesar 153,18. Hal ini dapat diartikan bahwa petani pertanian perkebunan rakyat pendapatannya dari usaha pertanian lebih baik dari pada petani pada subsektor lain. Sementara itu pada subsektor tanaman pangan (NTPP) merupakan subsektor dengan NTP terendah di Papua Barat dan menjadi satu-satunya subsektor dengan NTP dibawah 100. Artinya indeks yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dari indeks yang diterima petani atau dapat dikatakan petani tanaman pangan belum *survive*.



Gambar 5. Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Papua Barat Tahun 2010-2012

Selama tahun 2012 nilai NTP Papua Barat selalu berada diatas 100, artinya indeks yang diterima petani selalu lebih tinggi dari indeks yang dibayarkan petani, atau dengan kata lain



bahwa petani di Papua Barat selalu mengalami surplus usaha tani meskipun nilainya sangat kecil. Dalam perkembangannya, selama satu tahun nilai indeks mengalami penurunan 2,52 persen, yaitu menurun dari 103,31 (NTP Desember 2011) menjadi 100,79 (NTP Desember 2012). Sebagai perbandingannya, inflasi pedesaan tahun kalender 2011 hanya 0,50 persen sedangkan tahun 2012 meningkat sangat signifikan yaitu menjadi 5,62 persen. Jadi sangatlah wajar bila nilai NTP tahun 2012 mengalami penurunan terhadap tahun 2011. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa indeks yang dibayar petani meningkat signifikan dan hampir menyamai indeks yang diterima petani (Gambar 4). Peningkatan indeks yang dibayarkan petani dipicu oleh inflasi atau kenaikan harga-harga barang dan jasa yang harus dikeluarkan petani untuk biaya produksi pertanian. Bila kecepatan peningkatan indeks yang dibayar petani ini terus menerus lebih tinggi dari yang diterima maka implikasinya adalah petani akan merugi.

E. INFLASI PEDESAAN

Inflasi Pedesaan merupakan cerminan dari perkembangan harga-harga barang konsumsi rumah tangga di wilayah pedesaan. Komponen indeks konsumsi rumah tangga pedesaan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok konsumsi rumah tangga yaitu bahan makanan, makanan jadi; sandang; perumahan; kesehatan; pendidikan rekreasi dan olah raga; serta transportasi dan komunikasi. Data inflasi pedesaan diperoleh dari Survei Harga Pedesaan yang rutin dikumpulkan setiap bulan.

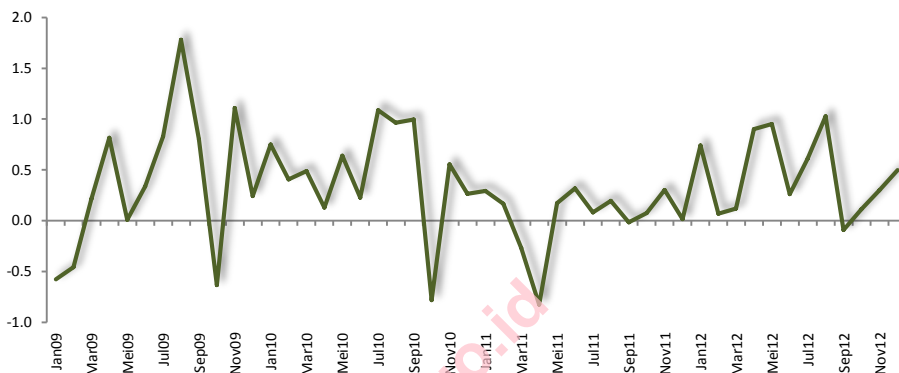
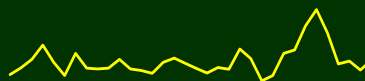
IHK Pedesaan Papua Barat bulan Desember 2012 adalah sebesar 141,18, artinya secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di daerah pedesaan sebesar 41,18 persen terhadap harga pada tahun dasar tahun 2007. Kenaikan harga tertinggi berada pada kelompok pengeluaran bahan makanan, yaitu sebesar 62,35 persen atau lebih dari satu setengah kali lipat dibandingkan harga dasar tahun 2007. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki nilai IHK 105,28. Artinya hanya terjadi kenaikan harga sekitar 5,28 persen terhadap tahun dasar 2007.



Tabel 11.		Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2012 (2007=100)			
Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan				
	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Bahan Makanan	139,08	151,83	151,04	162,35	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	114,34	119,89	122,25	129,42	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	121,57	123,18	123,12	125,77	
Sandang	126,26	127,71	131,44	136,75	
Kesehatan	120,87	122,47	123,99	127,37	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	107,12	109,70	112,66	114,41	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,16	103,54	104,02	105,28	
UMUM/TOTAL	125,65	133,00	133,67	141,18	

Sumber: Survei Harga Pedesaan, 2009-2012

Sepanjang empat tahun terakhir, bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2012, inflasi pedesaan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2009 dengan nilai inflasi sebesar 1,78 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2011 yaitu -0,83 persen. Sedangkan selama tahun 2012 fluktuasi harga kembali 'tidak terkendali' setelah di tahun 2011 gejolak harga dapat diredam dengan baik. Dalam 12 bulan di tahun 2012 terjadi sebelas kali inflasi dan hanya satu kali deflasi dibulan September (-0,09 persen), dan inflasi pedesaan tertinggi di tahun itu adalah 1,02 persen yang terjadi pada bulan Agustus 2012. Dalam sejarah pemantauan perkembangan harga pedesaan di Papua Barat (2008-2012) telah terjadi dua kali kejadian seperti ini, yaitu dalam 12 bulan terjadi sebelas kali inflasi dalam satu tahun. Kenaikan harga yang tidak terkendali seperti ini dapat berakibat pada turunnya nilai surplus usaha petani.



Gambar 6. Perkembangan Laju Inflasi Pedesaan Januari 2009-Desember 2012 Provinsi Papua Barat (2007=100)

Tahun 2012 tingkat harga di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 menurut kelompok pengeluaran. Enam dari tujuh kelompok pengeluaran memiliki inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya bahkan tidak ada satupun diantaranya yang terjadi deflasi. Dua kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran bahan makanan (-0,52 persen menjadi 7,49 persen) serta kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (1,97 menjadi 5,87 persen).

Peningkatan harga-harga barang dan jasa pedesaan di Papua Barat terlihat dari tingginya inflasi tahun kalender 2012. Inflasi tahun kalender tahun 2012 mencapai sebesar 5,62 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun kalender tahun 2011 (0,50 persen) dan sedikit lebih rendah dari inflasi tahun kalender 2010 (5,85 persen). Inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran diwarnai dengan terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan (7,49 persen); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (5,87 persen); sandang (4,04 persen); kesehatan (2,73 persen); perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (2,15 persen); pendidikan, rekreasi, dan olah raga (1,55 persen); dan transport, komunikasi, dan jasa keuangan (1,21 persen).



Tabel 12.		Laju Inflasi Pedesaan Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2012 (2007=100)		
Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Tahun Kalender			
	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bahan Makanan	9,17	-0,52	7,49	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,85	1,97	5,87	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,37	-0,05	2,15	
Sandang	1,14	2,92	4,04	
Kesehatan	1,32	1,24	2,73	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	2,40	2,70	1,55	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,35	0,46	1,21	
UMUM/TOTAL	5,85	0,50	5,62	

Sumber: Survei Harga Pedesaan, 2010-2012

Berdasarkan hasil Sakernas, terlihat bahwa selama ini proporsi pekerja disektor pertanian adalah yang paling dominan di Papua Barat. Di tahun 2012 proporsinya mencapai hampir setengah dari penduduk yang bekerja (46,52 persen). Disamping itu perlu diketahui juga bahwa sebagian besar pekerja disektor pertanian tersebut berada di daerah pedesaan. Dengan proporsi yang besar ini, tingkat kesejahteraan petani (pekerja disektor pertanian) berpengaruh besar pada tingkat kesejahteraan penduduk di Papua Barat secara umum. Kaitan antara inflasi pedesaan dengan kesejahteraan petani tercermin pada nilai NTP. Nilai NTP Papua Barat yang terus menurun karena dipengaruhi oleh tingkat kenaikan harga dipedesaan yang tinggi, dimana hal ini menyebabkan indeks yang dibayar oleh petani semakin meningkat, sehingga menyebabkan nilai NTP semakin menurun dan surplus usaha petani semakin kecil. Artinya adalah tingkat kesejahteraan petani semakin lama semakin menurun.



F. INFLASI

Inflasi (untuk daerah perkotaan) merupakan salah satu indikator makro yang perkembangannya dimonitor secara ketat oleh pemerintah, karena besaran agregat inflasi secara langsung akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan buruh/pekerja swasta. Inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pasar barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspektasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak negatif dari tingginya inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya *purchasing power parity* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IHK Papua Barat tahun 2011 adalah sebesar 151,64, artinya secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di daerah perkotaan sebesar 51,64 persen atau lebih dari satu setengah kali lipat terhadap harga pada tahun dasar tahun 2007. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yaitu 67,72 persen terhadap harga tahun dasar 2007. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Persentase kenaikan harga pada kelompok pengeluaran ini hanya sebesar 28,21 persen terhadap tahun dasar 2007.

Bila diperbandingkan antara perubahan harga di perkotaan dan pedesaan, tampak bahwa kenaikan harga lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan. Harga-harga barang dan jasa diperkotaan meningkat 51,64 persen selama empat tahun terakhir, sedangkan pada daerah pedesaan kenaikan harganya relatif lebih rendah, yaitu hanya 41,18 persen terhadap harga tahun dasar 2007. Bila dilihat dari tingkat kenaikan harga selama empat tahun terakhir menurut kelompok pengeluarannya pun berbeda. Di daerah pedesaan kenaikan harga tertinggi terdapat pada kelompok pengeluaran bahan makanan (nilai IHK 162,35), sedangkan kenaikan harga

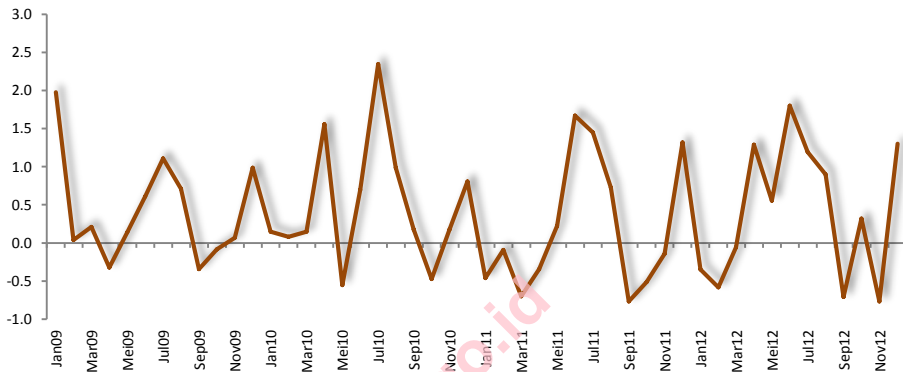


terendah terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (nilai IHK 105,28). Untuk daerah perkotaan tingkat kenaikan harga tertinggi dalam empat tahun terakhir berada pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (nilai IHK 167,72), dan tingkat kenaikan harga terendahnya berada pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga (nilai IHK 128,21).

Tabel 13.		Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2012 (2007=100)			
Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen (IHK)				
	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Bahan Makanan	144,82	156,90	156,45	167,38	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	147,45	159,37	162,15	167,72	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,81	137,48	142,76	145,75	
Sandang	117,35	120,11	123,39	128,59	
Kesehatan	125,78	129,93	134,98	138,42	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	113,72	120,49	123,89	128,21	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	111,96	116,73	123,69	131,94	
UMUM/TOTAL	132,80	141,10	144,44	151,64	

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2009-2012

Sepanjang empat tahun terakhir, yaitu bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2012, inflasi perkotaan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2010 dengan nilai inflasi mencapai 2,35 persen. sementara itu deflasi tertinggi terjadi di bulan September 2009 dan November 2012 yaitu sebesar -0,76 persen. Pada periode itu pula terjadi 21 kali inflasi dan 17 kali deflasi



Gambar 7. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Papua Barat Januari 2008-Desember 2011

selama 48 bulan selama empat tahun terakhir. Perubahan harga paling ekstrim antar bulan terjadi pada bulan April ke Mei 2010 dimana terjadi perubahan harga sebesar 2,11 persen, yaitu dari inflasi 1,56 persen menjadi deflasi -0,55 persen.

Kondisi perubahan harga di Papua Barat tahun 2012 tidak lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2011. Sepanjang 12 bulan di tahun 2012 terjadi tujuh kali inflasi, bahkan lima kali diantaranya terjadi secara beruntun yaitu dari bulan April-Agustus 2012. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,80 persen dengan pemicu utama inflasi adalah kenaikan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan (nilai inflasi 4,08 persen) serta transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan (nilai inflasi 2,04 persen). Sedangkan untuk deflasi tertinggi terjadi bulan November yaitu sebesar -0,76 persen dengan penyebab utama penurunan harga terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan (deflasi -3,58 persen) dan kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga (0,00 persen). Inflasi terjadi pada bulan Juni adalah musim libur sekolah dan menjelang tahun ajaran baru sekolah, bulan Juli-Agustus adalah bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta di bulan Desember karena ada



peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2012. Dampak dari libur sekolah Hari Raya Idul Fitri dan libur Natal dan Tahun Baru terlihat dari tingginya inflasi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan serta kenaikan harga kelompok bahan makanan.

Untuk daerah seperti Papua Barat yang menggantungkan ketersediaan sebagian kebutuhan barang dan jasa dari luar provinsi terutama melalui jalur laut, kelancaran transportasi dan distribusi barang sangat mempengaruhi kestabilan harga pasar. Tidak ada pilihan selain harus memonitor perkembangan harga dan permintaan kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi akibat dari kenaikan harga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, dampaknya kinerja perekonomian menjadi menurun dan kemiskinan cenderung meningkat terutama didaerah perkotaan.

Kelompok Pengeluaran	Inflasi											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bahan Makanan	-0,35	-1,48	-0,19	1,40	1,56	4,08	2,97	-0,03	-1,53	0,80	-3,58	3,38
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,26	0,12	0,27	0,44	0,90	0,42	0,26	0,22	0,19	0,13	0,10	0,06
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,40	0,14	0,10	0,25	-0,01	0,03	0,45	0,05	-0,01	0,08	0,58	0,01
Sandang	-0,03	0,25	0,15	0,41	0,85	0,44	0,14	0,13	0,29	0,34	0,76	0,41
Kesehatan	0,24	0,53	0,56	0,24	0,05	0,05	0,16	-1,13	1,45	-0,24	0,28	0,35
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	0,06	0,39	0,17	1,34	0,00	0,01	1,16	-0,05	0,39	0,01	0,00	-0,04
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-2,09	-1,12	-0,44	3,54	-0,81	2,04	0,02	5,03	-1,68	0,11	1,14	0,99
UMUM/TOTAL	-0,35	-0,58	-0,05	1,29	0,56	1,80	1,20	0,90	-0,71	0,32	-0,76	1,30

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2012

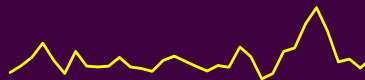




Stabilitas harga dapat terlihat dari laju inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender Papua Barat meningkat tajam dari 2,36 persen di tahun 2011 menjadi sebesar 4,99 persen di tahun 2012. sebelumnya di tahun 2010 inflasi tahun kalender bahkan mencapai 6,25 persen. Penyebab utama meningkatnya inflasi tahun kalender tahun 2012 adalah terjadi peningkatan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan terhadap tahun 2011 (-0,29 persen menjadi 6,98 persen) dan kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (5,96 persen menjadi 6,67 persen). Tingginya laju inflasi tahun kalender ini membuktikan bahwa kenaikan harga barang dan jasa selama tahun 2012 ini belum berhasil ditekan, meskipun di tahun 2011 lalu pengendalian harga sudah berjalan dengan baik. Kenaikan harga di tahun 2012 ini berimplikasi pada belum berhasilnya penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meskipun angka pengangguran telah berhasil diturunkan cukup signifikan.

Tabel 15		Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2012 (2007=100)		
Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Tahun Kalender			
	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bahan Makanan	8,34	-0,29	6,98	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,08	1,74	3,43	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,30	3,84	2,09	
Sandang	2,36	2,73	4,22	
Kesehatan	3,30	3,89	2,55	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	5,96	2,82	3,48	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	4,26	5,96	6,67	
UMUM/TOTAL	6,25	2,36	4,99	

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2009-2011



G. KINERJA PEREKONOMIAN

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu PDRB pendekatan produksi/lapangan usaha dan PDRB pendekatan pengeluaran/penggunaan.

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). PDRB ADHB menggunakan harga berlaku saat PDRB dihitung (*current price*), sedangkan pada PDRB ADHK menggunakan harga pada suatu tahun yang disebut tahun dasar agar terbebas dari pengaruh inflasi. Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

1. Struktur Ekonomi

Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Papua Barat tahun 2012 mengalami peningkatan tajam sebesar 6.581,16 miliar rupiah menjadi 42.759,94 miliar rupiah. Kondisi ini meningkat dibandingkan PDRB tahun 2011 yang sebesar 36.178,78 miliar rupiah. Bila tanpa memperhitungkan subsektor minyak dan gas (migas) PDRB ADHB Papua Barat mengalami peningkatan dari 16.575,62 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 18.778,84 miliar rupiah di tahun 2012 atau terjadi peningkatan sebesar 2.203,22 miliar rupiah. Selisih antara PDRB dengan migas dan tanpa migas mencapai 23.981,09 miliar rupiah atau sebesar 56,08 persen. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat sangat signifikan.





Bahkan dari tahun ke tahun kontribusi subsektor migas terus meningkat. Di tahun 2010 kontribusi subsektor migas hanya 47,69 persen, kemudian meningkat menjadi 54,18 persen di tahun 2011. Selanjutnya di tahun 2012 kontribusi subsektor ini kembali meningkat menjadi 56,08 persen atau mencapai lebih dari setengah dari total PDRB Papua Barat. Subsektor migas yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB Papua Barat terutama berasal dari gas alam cair (*Liquid Natural Gas*) yang diproduksi oleh LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel 16.		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012				
Lapangan Usaha	PDRB ADHB			Struktur Ekonomi		
	2010	2011 *	2012 **	2010	2011 *	2012 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	4065165.14	4976708.57	5198159.91	17.36	13.76	12.16
Pertambangan dan Penggalian	2302782.91	2615421.89	2771274.60	8.57	7.23	6.48
Industri Pengolahan	11970841.30	18689731.89	23087926.25	44.55	51.66	53.99
Listrik, Air, dan Gas	97557.00	110622.75	126780.66	0.36	0.31	0.30
Konstruksi	2034290.84	2483291.41	3135426.02	7.57	6.86	7.33
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1888243.87	2349080.27	2825521.88	7.03	6.49	6.61
Pengangkutan dan Komunikasi	1429837.86	1699658.44	1993707.88	5.32	4.70	4.66
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	556889.28	669801.93	813989.53	2.07	1.85	1.90
Jasa-jasa	1927478.33	2584463.00	2807151.51	7.17	7.14	6.56
PDRB	26873086.52	36178780.13	42759938.25	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa Migas	14057030.61	16575621.39	18778843.25	52.31	45.82	43.92

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2010-2012

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar PDRB Papua Barat berasal dari Sektor Industri pengolahan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor industri pengolahan bertransformasi menjadi sebuah kekuatan perekonomian baru di Papua Barat. Di tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 44,55 persen. Kemudian di tahun 2011 kontribusinya semakin meningkat menjadi 51,66 persen. Selanjutnya kontribusi sektor ini di tahun 2012 mencapai 53,99 persen atau lebih dari setengah total PDRB Papua Barat. Semula sebelum sektor industri LNG beroperasi, kontributor utama PDRB Papua Barat adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian semakin menurun beberapa tahun terakhir, walaupun sebelumnya juga telah mengalami tren menurun, tetapi dengan mulai berproduksinya LNG Tangguh di Teluk Bintuni berdampak terhadap penurunan kontribusi sektor pertanian.

Tabel 17.		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012				
Penggunaan	PDRB ADHB			Struktur Ekonomi		
	2010	2011 *	2012 **	2010	2011 *	2012 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11268707.07	13142728.91	15109756.23	41.93	36.33	35.34
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	116900.20	131483.48	146465.01	0.44	0.36	0.34
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4638048.84	5557238.67	6222003.44	17.26	15.36	14.55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6590543.06	7929545.84	10051777.20	24.52	21.92	23.51
Perubahan Inventori	1437110.84	1725178.63	5192565.81	5.35	4.77	12.14
Ekspor	12243061.04	18647399.49	20297279.47	45.56	51.54	47.47
Impor (-)	9421284.56	10954794.89	14259908.91	35.06	30.28	33.35
PDRB	26873086.52	36178780.13	42759938.25	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan, 2010-2012 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Struktur ekonomi berdasarkan PDRB penggunaan juga mengalami pergeseran sejak mulai berproduksinya LNG Tangguh. Semula kontributor terbesar PDRB penggunaan adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. *Share* pengeluaran konsumsi rumah tangga sebelum tahun 2010 masih menjadi kontributor utama dalam PDRB penggunaan. Setelah itu, kontribusinya lebih kecil dari ekspor dan terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 41,93 persen (2010); 36,33 persen (2011); dan 35,34 persen (2012). Mulai pada saat itulah kontributor utama PDRB penggunaan beralih ke ekspor. Kontribusi ekspor Papua Barat di tahun 2010 mencapai 45,56 persen. Kemudian di tahun 2011 kontribusinya meningkat lebih dari setengah PDRB Papua Barat, yaitu sebesar 51,54 persen. Akan tetapi kontribusi ekspor di tahun 2012 sedikit menurun menjadi 47,47 persen karena adanya penurunan produksi LNG Tangguh dan berimplikasi pada volume LNG yang diekspor ke luar negeri.

Sejak mulai beroperasi LNG Tangguh pertengahan tahun 2009, secara otomatis kontribusi subsektor migas terhadap total PDRB meningkat, sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan karena memiliki *share* yang tertinggi di Papua Barat, dan aktivitas ekspor Papua Barat serta merta melonjak untuk mengeksport hasil produksi gas alam cair yang dihasilkan oleh LNG Tangguh.

2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah umumnya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Papua Barat tahun 2012 sebesar 13.781,16 miliar rupiah meningkat 1.884,93 miliar rupiah dari 11.896,23 miliar rupiah di tahun 2011. Di sisi





lain, PDRB ADHK tanpa migas Papua Barat tahun 2012 sebesar 6.996,76 miliar rupiah meningkat 482,49 miliar rupiah dari 6.514,27 miliar rupiah di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2012 dengan migas sebesar 15,84 persen. Sebelumnya di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga sangat tinggi hingga mencapai 27,08 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Papua Barat dalam dua tahun terakhir justru mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 yang mencapai 28,47 persen. Dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Papua Barat memang meningkat sangat tinggi. Namun menurunnya produksi gas alam cair LNG Tangguh yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB Papua Barat membawa efek pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih dari setengah PDRB-nya dikontribusi oleh minyak dan gas.

Kontribusi subsektor migas yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat besarnya kontribusi subsektor migas seperti yang terjadi di Papua Barat ini seringkali kurang menggambarkan kondisi riil pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Untuk itulah sebagai pembandingnya dapat digambarkan dengan melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi tanpa migas, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tanpa menyertakan unsur migas, baik itu berupa pertambangan maupun industri pengolahan migas.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas tahun 2012 sebesar 7,41 persen, atau mengalami perlambatan dari 10,21 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011. Sebelumnya di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas adalah sebesar 8,52 persen. Walaupun Papua Barat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik itu dengan migas maupun tanpa migas, tetapi angka tersebut telah berada pada range sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Barat 2010-2014 yang memasang target 6,2-6,8 (2010) persen dan 7,0-7,6 persen (2014). Bahkan untuk sasaran RPJM pertumbuhan ekonomi 2014 pun telah dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun demikian, target



2014 masih panjang, pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat dapat berpeluang untuk kembali melambat atau justru akan menurun mengingat ekonomi global sedang terpuruk karena krisis ekonomi di Eropa dan Amerika. Namun peluang pertumbuhan ekonomi untuk kembali tumbuh masih terbuka jika produksi gas alam cair dapat kembali dipacu dengan adanya perbaikan fasilitas LNG yang rusak. Namun hal terpenting dari pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana ekonomi yang tumbuh berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 18.		PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012					
Lapangan Usaha	PDRB ADHK			Pertumbuhan Ekonomi			Sumber Pertumbuhan 2012
	2010	2011 *	2012 **	2010	2011 *	2012 **	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	2012215.00	2045718.10	2075894.20	6.08	1.66	1.48	0.25
Pertambangan dan Pengalihan	1090051.52	1155963.54	1219810.38	-0.84	6.05	5.52	0.54
Industri Pengolahan	3010930.03	4957829.44	6333959.20	120.02	64.66	27.76	11.57
Listrik, Air, dan Gas	34085.13	37102.74	40371.11	7.30	8.85	8.81	0.03
Konstruksi	718468.24	806397.72	905575.36	9.77	12.24	12.30	0.83
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	743881.85	833958.19	916688.88	3.99	12.11	9.92	0.70
Pengangkutan dan Komunikasi	609263.16	681660.78	760509.74	10.40	11.88	11.57	0.66
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	198241.93	220504.93	233463.17	6.56	11.23	5.88	0.11
Jasa-jasa	944223.36	1157091.81	1294885.29	20.61	22.54	11.91	1.16
PDRB	9361360.21	11896227.25	13781157.34	28.47	27.08	15.84	15.84
PDRB Tanpa Migas	5910689.63	6514274.52	6996765.52	8.52	10.21	7.41	

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2010-2012 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2012 ini didorong oleh beberapa sektor. Empat sektor utama yang pertumbuhannya paling tinggi adalah industri pengolahan (27,76%); konstruksi (12,30%); jasa-jasa (11,91%); serta pengangkutan dan komunikasi (11,57%). Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi Papua Barat menurut lapangan usaha beberapa tahun ini didominasi oleh sektor industri pengolahan. Tiga tahun ini, industri pengolahan menunjukkan performa yang menakjubkan. Di tahun 2010 pertumbuhannya mencapai 120,02 persen. Selanjutnya di tahun 2011, walaupun melambat, pertumbuhannya tetap fantastis, yaitu mencapai 64,66 persen. Dan di tahun 2012, industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang tinggi meskipun kembali mengalami perlambatan menjadi 27,76 persen.

Dari pertumbuhan ekonomi Papua Barat sebesar 15,84 persen di tahun 2012, sebesar 11,57 persennya bersumber pada industri pengolahan. Sedangkan sumber pertumbuhan untuk sektor-sektor lainnya tidak lebih dari satu persen kecuali sektor jasa-jasa yaitu sebesar 1,16 persen. Tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan ini seperti sebelumnya disebutkan berasal dari produksi gas alam cair LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

PDRB Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan dari 9.361,36 miliar rupiah menjadi 11.896,23 miliar rupiah di tahun 2011. Di tahun 2012, PDRB ADHK bertambah 1.884,93 miliar rupiah menjadi 13.781,16 miliar rupiah. Nilai agregat tertinggi PDRB ADHK tahun 2012 digunakan untuk ekspor, yaitu sebesar 9.135,93 miliar rupiah. Pengeluaran untuk impor berada dipenggunaan terbesar kedua dengan nilai agregat sebesar 5.483,67 miliar rupiah.

Berdasarkan PDRB menurut penggunaan, pertumbuhan tertinggi di tahun 2012 berasal dari penggunaan impor yaitu sebesar 71,64 persen. Kondisi ini bertolak belakang pada tahun sebelumnya dimana pertumbuhan PDRB tertinggi digunakan untuk ekspor, yaitu sebesar 54,56





persen. Ekspor dan Pembentukan modal tetap bruto menjadi kegiatan yang memiliki pertumbuhan terbesar setelah impor yang masing-masing memiliki pertumbuhan 21,60 persen dan 8,44 persen. Sedangkan dari 15,84 persen pertumbuhan Papua Barat, 19,24 persen diantaranya bersumber dari penggunaan impor, sedangkan sisanya bersumber dari kegiatan penggunaan lainnya (perubahan inventori 14,60 persen; ekspor 13,64 persen; pengeluaran konsumsi rumah tangga 3,34 persen; pembentukan modal tetap bruto 2,80 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah 0,69 persen; dan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba 0,02 persen).

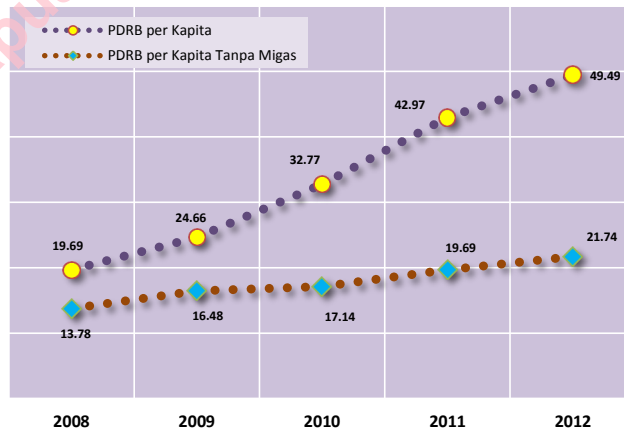
Tabel 19.		PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012					
Penggunaan	PDRB ADHK			Pertumbuhan Ekonomi			Sumber Pertumbuhan 2012
	2010	2011 *	2012 **	2010	2011 *	2012 **	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4292091.43	4712361.92	5109866.30	6.43	9.79	8.44	3.34
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	46413.98	49850.87	51831.37	5.57	7.40	3.97	0.02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1422121.55	1455570.65	1537781.02	15.08	2.35	5.65	0.69
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2019927.40	2239235.46	2572079.22	7.73	10.86	14.86	2.80
Perubahan Inventori	-346206.76	-879054.16	857339.59	-276,99	153,91	-197.53	14.60
Ekspor	4860977.33	7513151.99	9135932.21	78.03	54.56	21.60	13.64
Impor (-)	2933964.71	3194889.49	5483672.37	3.80	8.89	71.64	19.24
PDRB	9361360.21	11896227.25	13781157.34	28.47	27.08	15.84	15.84

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan, 2010-2012 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB (atas dasar harga berlaku) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun berjalan. Pada tahun 2012 angka PDRB per kapita diperkirakan mencapai 49,49 juta rupiah per tahun dengan laju peningkatan sebesar 15,18 persen. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2011 yaitu 42,97 juta rupiah atau meningkat 6,52 juta rupiah dalam satu tahun. Sedangkan untuk melihat PDRB per kapita yang lebih menggambarkan kondisi perekonomian Papua Barat dapat di lihat dari PDRB per kapita tanpa migas. Seperti halnya PDRB per kapita dengan migas, PDRB per kapita tanpa migas Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB per kapita Papua Barat meningkat dari 19,69 juta rupiah per tahun pada tahun 2011 menjadi 21,74 juta rupiah per tahun di tahun 2012.



Gambar 8. PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012





DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2012*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Agustus 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik: Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar (Angka Ramalan II Tahun 2012)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Papua Barat 2011 (Bulan Januari-Desember 2012)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Inflasi Pedesaan Provinsi Papua Barat (Bulan Januari-Desember 2012)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Maret 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Tahun 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Papua Barat Dalam Angka 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2012. *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2013. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2013. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Provinsi Papua Barat September 2012*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.



LAMPIRAN

**Tabel 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2008-Desember 2012
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	106.07	128.70	132.99	140.45	143.94
Februari	106.03	128.76	133.10	140.32	143.10
Maret	106.91	129.03	133.30	139.34	143.02
April	107.51	128.62	135.37	138.86	144.87
Mei	111.30	128.80	134.62	139.17	145.68
Juni	117.70	129.59	135.56	141.50	148.31
Juli	122.64	131.02	138.75	143.55	150.08
Agustus	124.96	131.96	140.12	144.60	151.43
September	126.91	131.51	140.38	143.49	150.36
Oktober	126.20	131.41	139.71	142.76	150.84
November	124.87	131.50	139.97	142.56	149.69
Desember	126.21	132.80	141.10	144.44	151.64

**Tabel 2. Inflasi Bulanan Gabungan Januari 2008-Desember 2012
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	0.9	1.98	0.15	-0.46	-0.35
Februari	-0.03	0.04	0.08	-0.09	-0.58
Maret	0.83	0.21	0.15	-0.70	-0.05
April	0.56	-0.32	1.56	-0.34	1.29
Mei	3.53	0.14	-0.55	0.22	0.56
Juni	5.75	0.61	0.70	1.67	1.80
Juli	4.2	1.11	2.35	1.45	1.20
Agustus	1.89	0.71	0.99	0.73	0.90
September	1.56	-0.34	0.18	-0.76	-0.71
Oktober	-0.56	-0.08	-0.47	-0.51	0.32
November	-1.06	0.07	0.18	-0.14	-0.76
Desember	1.07	0.99	0.81	1.32	1.30



**Tabel 3. Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Januari 2008-Desember 2012
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	103.62	119.51	126.59	133.39	134.66
Februari	104.15	118.97	127.10	133.61	134.75
Maret	105.74	119.22	127.72	133.25	134.91
April	106.89	120.19	127.88	132.15	136.13
Mei	109.34	120.20	128.70	132.38	137.42
Juni	113.20	120.61	128.99	132.80	137.77
Juli	116.73	121.60	130.40	132.91	138.61
Agustus	118.67	123.77	131.65	133.17	140.03
September	119.25	124.76	132.96	133.15	139.90
Oktober	119.74	123.97	131.92	133.25	140.06
November	120.15	125.34	132.65	133.65	140.48
Desember	120.21	125.65	133.00	133.67	141.18

**Tabel 4. Inflasi Pedesaan Bulanan Gabungan Februari 2008-Desember 2012
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari		-0.58	0.75	0.29	0.74
Februari	0.51	-0.46	0.40	0.16	0.07
Maret	1.52	0.21	0.49	-0.27	0.12
April	1.10	0.82	0.13	-0.83	0.90
Mei	2.29	0.01	0.64	0.17	0.95
Juni	3.54	0.34	0.23	0.32	0.26
Juli	3.12	0.83	1.09	0.08	0.61
Agustus	1.66	1.78	0.96	0.20	1.02
September	0.49	0.80	0.99	-0.02	-0.09
Oktober	0.41	-0.63	-0.78	0.08	0.11
November	0.34	1.11	0.55	0.30	0.30
Desember	0.05	0.24	0.26	0.01	0.50



Tabel 5. Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2008-Desember 2012
Provinsi Papua Barat

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	99.25	106.82	104.5	102.44	102.92
Februari	100.44	107.07	104.06	102.11	102.76
Maret	99.87	106.79	104.21	102.37	102.84
April	101.57	106.51	104.01	103.08	102.37
Mei	104.33	107.14	103.8	102.97	101.78
Juni	107.82	107.23	104.15	102.87	101.74
Juli	106.99	106.65	103.71	103.02	101.22
Agustus	106.24	104.62	103.06	103.38	100.81
September	107.95	104.97	102.56	103.23	100.64
Oktober	108.26	105.92	102.73	103.23	101.01
November	105.69	104.68	102.75	103.44	100.68
Desember	106.24	104.98	103.05	103.31	100.79

Tabel 6. Indeks Diterima Petani (I_a), Indeks Dibayar Petani (I_b), dan Nilai tukar Petani NTP)
Januari-Desember 2012

Bulan	Indeks Diterima Petani (I_a)	Indeks Diterima Petani (I_b)	Nilai Tukar Petani (NTP)
Januari	131.95	128.21	102.92
Februari	131.85	128.30	102.76
Maret	132.08	128.44	102.84
April	132.41	129.34	102.37
Mei	132.65	130.33	101.78
Juni	132.89	130.61	101.74
Juli	132.85	131.24	101.22
Agustus	133.39	132.32	100.81
September	133.08	132.23	100.64
Oktober	133.69	132.35	101.01
November	133.58	132.68	100.68
Desember	134.31	133.26	100.79



Tabel 7. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2010-2012

Uraian	2010	2011 (ATAP)	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010 - 2011		Perkembangan 2011 - 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	3.326	3.428	2.385	102	3,07	-1.043	-30,43
- Mei - Agustus	3.595	3.276	2.810	-319	-8,87	-466	-14,22
- September - Desember	2.543	1.579	2.939	-964	-37,91	1.360	86,13
- Januari - Desember	9.464	8.283	8.134	-1.181	-12,48	-149	-1,80
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	36,54	34,84	35,37	-1,70	-4,65	0,53	1,52
- Mei - Agustus	33,81	33,69	39,84	-0,12	-0,35	6,15	18,25
- September - Desember	39,12	40,05	42,06	0,93	2,38	2,01	5,02
- Januari - Desember	36,20	35,38	39,33	-0,82	-2,27	3,95	11,16
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	12.154	11.942	8.435	-212	-1,74	-3.507	-29,37
- Mei - Agustus	12.153	11.037	11.194	-1.116	-9,18	157	1,42
- September - Desember	9.948	6.324	12.361	-3.624	-36,43	6.037	95,46
- Januari - Desember	34.255	29.303	31.990	-4.952	-14,46	2.687	9,17

Keterangan: Kualitas produksi padi: Gabah Kering Giling (GKG)



Tabel 8. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung
di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2010-2012

Uraian	2010	2011 (ATAP)	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010 - 2011		Perkembangan 2011 - 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	265	442	342	177	66,79	-100	-22,62
- Mei - Agustus	292	468	451	176	60,27	-17	-3,63
- September - Desember	605	368	478	-237	-39,17	110	29,89
- Januari - Desember	1.162	1.278	1.271	116	9,98	-7	-0,55
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	15,03	15,72	16,87	0,64	4,24	1,15	7,32
- Mei - Agustus	17,01	17,03	17,05	0,02	0,12	0,02	0,12
- September - Desember	17,09	17,21	17,32	0,12	0,70	0,11	0,64
- Januari - Desember	16,62	16,63	17,10	0,01	0,06	0,47	2,83
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	400	695	577	295	73,75	-118	-16,98
- Mei - Agustus	497	797	769	300	60,36	-28	-3,51
- September - Desember	1.034	633	828	-401	-38,78	195	30,81
- Januari - Desember	1.931	2.125	2.174	194	10,05	49	2,31

Keterangan: Kualitas produksi jagung adalah Pipilan Kering



Tabel 9. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai
di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2010-2012

Uraian	2010	2011 (ATAP)	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010 - 2011		Perkembangan 2011 - 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	290	136	185	-154	-53,10	49	36,03
- Mei - Agustus	127	109	208	-18	-14,17	99	90,83
- September - Desember	154	130	482	-24	-15,58	352	270,77
- Januari - Desember	571	375	875	-196	-34,33	500	133,33
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	10,01	10,23	10,43	0,22	2,20	0,20	1,96
- Mei - Agustus	10,52	10,52	10,58	0,00	0,00	0,06	0,57
- September - Desember	11,46	11,46	11,29	0,00	0,00	-0,17	-1,48
- Januari - Desember	10,53	10,74	10,94	0,21	1,99	0,20	1,86
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	290	139	193	-151	-52,07	54	38,85
- Mei - Agustus	134	115	220	-19	-14,18	105	91,30
- September - Desember	177	149	544	-28	-15,82	395	265,10
- Januari - Desember	601	403	957	-198	-32,95	554	137,47

Keterangan: Kualitas produksi kedelai adalah Biji Kering



Tabel 10. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2010	2011 (ATAP)	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010 - 2011		Perkembangan 2011 - 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	302	670	458	368	121,85	-212	-31,64
- Mei - Agustus	330	631	142	301	91,21	-489	-77,50
- September - Desember	1.737	443	660	-1.294	-74,50	217	48,98
- Januari - Desember	2.369	1.744	1.260	-625	-26,38	-484	-27,75
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	116,99	117,52	117,66	0,53	0,45	0,14	0,12
- Mei - Agustus	112,41	117,02	117,68	4,61	4,10	0,66	0,56
- September - Desember	102,88	116,97	110,12	14,09	13,70	-6,85	-5,86
- Januari - Desember	106,01	117,20	113,71	11,19	10,56	-3,49	-2,98
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	3.533	7.874	5.389	4.341	122,87	-2.485	-31,56
- Mei - Agustus	3.710	7.384	1.671	3.674	99,03	-5.713	-77,37
- September - Desember	17.871	5.182	7.268	-12.689	-71,00	2.086	40,25
- Januari - Desember	25.114	20.440	14.328	-4.674	-18,61	-6.112	-29,90

Keterangan: Kualitas produksi ubi kayu adalah Umbi basah



Tabel 11. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2010-2012

Uraian	2010	2011 (ATAP)	2012 (Aram II)	Perkembangan 2010 - 2011		Perkembangan 2011 - 2012	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	222	354	356	132	59,46	2	0,56
- Mei - Agustus	252	393	418	141	55,95	25	6,36
- September - Desember	565	271	271	-294	-52,04	0	0,00
- Januari - Desember	1.039	1.018	1.045	-21	-2,02	27	2,65
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	104,90	104,90	104,41	0,00	0,00	-0,49	-0,47
- Mei - Agustus	100,76	100,97	104,26	0,21	0,21	3,29	3,26
- September - Desember	100,69	100,68	100,85	-0,01	-0,01	0,17	0,17
- Januari - Desember	101,61	102,26	103,43	0,65	0,64	1,17	1,14
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	2.329	3.713	3.717	1.384	59,42	4	0,11
- Mei - Agustus	2.539	3.968	4.358	1.429	56,28	390	9,83
- September - Desember	5.689	2.729	2.733	-2.960	-52,03	4	0,15
- Januari - Desember	10.557	10.410	10.808	-147	-1,39	398	3,82

Keterangan: Kualitas produksi ubi jalar adalah Umbi basah

<http://papuabaratsps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315
Telp. 0986.214199 Fax. 0986.214199
E-mail : bps9100@bps.go.id
Homepage : www.irjabar.bps.go.id

